

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan telekomunikasi pada awalnya dikuasai oleh Negara karena dianggap sebagai layanan publik yang penting namun kurang menguntungkan dari secara bisnis karena membutuhkan investasi yang sangat besar dan tingkat pengembalian yang rendah.

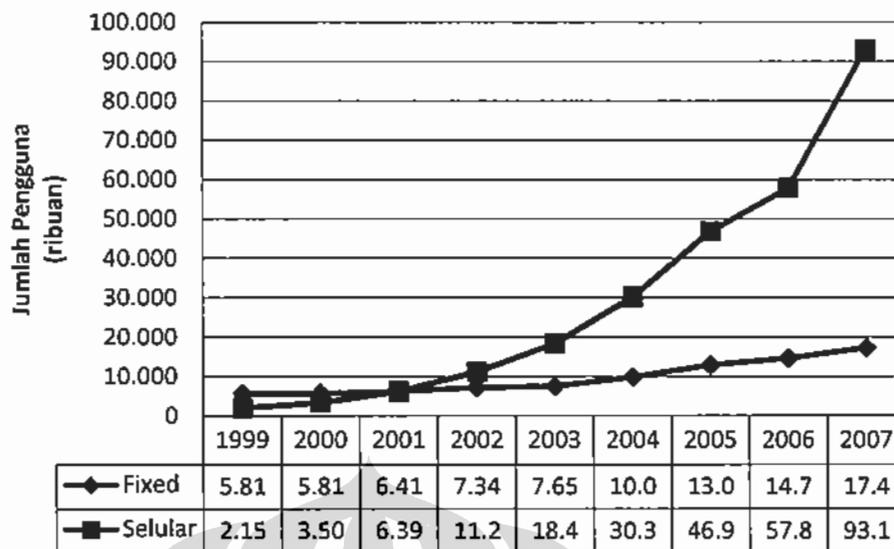
Seiring dengan perkembangan teknologi yang demikian cepat menyebabkan biaya telekomunikasi semakin murah. Hal ini disebabkan karena kemampuan perangkat jaringan telekomunikasi semakin baik sehingga mampu melayani pelanggan yang lebih banyak dengan biaya investasi yang sama. Kebutuhan masyarakat untuk berkomunikasi menggunakan telepon yang terus meningkat pada akhirnya mencapai tingkat diatas kemampuan penyediaan jaringan oleh penyelenggara Telekomunikasi.

Biaya investasi jaringan telekomunikasi yang semakin murah dan permintaan akan layanan telekomunikasi yang semakin meningkat menyebabkan perubahan paradigma dari Telekomunikasi yang merupakan kewajiban (Pemerintah) terhadap publik menjadi komoditi atau suatu peluang bisnis yang sangat menguntungkan karena merupakan kebutuhan semua manusia sepanjang waktu. Hal ini yang mendorong liberalisasi Telekomunikasi di seluruh dunia.

Di Indonesia sejak kemerdekaan RI Telekomunikasi diselenggarakan oleh suatu Jawatan Pos, Telegraf dan Telepon (PTT) dan kemudian sejak tahun 1961 barulah dibentuk Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN Postel) sebagai penyelenggara yang terpisah dengan fungsi Pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Deregulasi di bidang Telekomunikasi ini merupakan kemajuan jika dibandingkan dengan Negara Eropa, Malaysia, Thailand dan sebagainya yang masih menyatukan kedua fungsi tersebut. [1].

Sejak tahun 1989 dimulailah liberalisasi Telekomunikasi di Indonesia dengan terbitnya Undang – Undang Nomor 3 tahun 1989 tentang Telekomunikasi. Undang – undang ini telah membuka kesempatan bagi perusahaan swasta untuk melakukan usaha di sektor Telekomunikasi secara penuh pada layanan Non Dasar atau bukan layanan suara. Sedangkan untuk jenis layanan Dasar, perusahaan swasta harus bekerjasama dengan 2 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telekomunikasi yang ada pada waktu itu yaitu PERUMTEL untuk komunikasi domestik dan PT. INDOSAT untuk komunikasi internasional. Pemerintah merasa tidak mampu untuk menyediakan seluruh sarana Telekomunikasi bagi seluruh rakyat tanpa partisipasi swasta [1].

Semenjak deregulasi tersebut Telekomunikasi mulai berkembang dengan pesat dan beragam seperti Radio Panggil Untuk Umum (RPUU) dan Sistem Telekomunikasi Bergerak yang menggunakan frekuensi radio disamping jaringan telepon tetap yang menggunakan kabel. PERUMTEL yang kemudian berubah namanya menjadi PT. Telkom kemudian juga melakukan pola *Build Operate Transfer* (BOT) dengan perusahaan lokal dan asing yang dikenal dengan Program Kerja Sama Operasi (KSO). Pada tahun 1996 hingga tahun 1998 sejak Program KSO dilaksanakan jumlah satuan sambungan telepon tetap meningkat dari 4,8 juta menjadi 7,4 juta, dengan rata – rata tingkat pertumbuhan pertahun sebesar 170 % [2]. Namun pertumbuhan ini menurun drastis sejak tahun 1998 hingga hanya 2,8 % dikarenakan krisis ekonomi yang melanda Indonesia. [2]. Sementara itu jaringan bergerak seluler juga mengalami pertumbuhan yang pesat sejak diperkenalkannya teknologi *Global System for Mobile Communication* (GSM) pada tahun 1993 dan sedikit sekali terpengaruh dengan krisis ekonomi pada tahun 1997. Hal ini disebabkan karena biaya investasi pada jaringan nirkabel yang relatif murah dan pembangunannya yang relatif cepat. Biaya Investasi untuk satu satuan sambungan telepon tetap pada waktu itu sekitar USD 700 sedangkan untuk telepon bergerak seluler hanya USD 200.



Gambar 1.1 Pertumbuhan Pelanggan Telepon Tetap dan Bergerak (Sumber :
Diolah dari laporan operator)

Dari Gambar 1.1 diatas dapat kita lihat perkembangan telepon bergerak selular yang demikian pesat hingga tahun 2001 sudah mampu menyamai jumlah pelanggan telepon tetap yang telah diperkenalkan dan diselenggarakan hampir 50 tahun kebelakang.

Mempertimbangkan biaya investasi jaringan nirkabel yang jauh lebih murah dari jaringan kabel, maka sejak tahun 2002 PT. Telkom mulai memperkenalkan layanan Jaringan Tetap Akses Nirkabel yang lebih dikenal dengan nama *Fixed Wireless Access (FWA)*. Layanan ini menggunakan teknologi jaringan telekomunikasi bergerak seluler CDMA2000-1x. Dengan menggunakan teknologi ini, maka jaringan dapat dikembangkan dengan sangat cepat. Biaya pembangunan per Satuan Sambungan Telepon (SST) dari FWA ini kurang dari 1/3 biaya pembangunan SST jaringan telepon tetap berbasis kabel. Hal ini menyebabkan FWA ini menjadi sangat potensial untuk mendongkrak teledensitas di Indonesia seperti terlihat juga dalam Gambar 1.1 diatas.

Berdasarkan aturan yang ada sekarang, layanan FWA dikategorikan sebagai bagian dari jaringan telepon tetap yang memiliki kemampuan mobilitas terbatas sehingga dikenakan tarif BHP Frekuensi yang lebih murah dari jaringan bergerak

seluler. Jaringan Bergerak Seluler dikategorikan sebagai jaringan yang memiliki keunggulan mobilitas penuh dan kemampuan jelajah (*roaming*) sehingga dikenakan BHP Frekuensi yang lebih tinggi dari FWA. Selain itu biaya interkoneksi untuk FWA juga sama dengan telepon tetap berbasis kabel.

Walaupun dengan aturan yang ada mobilitas dari layanan FWA dibatasi, namun pengguna FWA dapat melakukan dan menerima panggilan diluar area terdaftarnya nomor pelanggan tersebut dengan fitur seperti “Flexi Combo” dan “ESIA Go Go”. Kemampuan lain yang mirip dengan layanan seluler adalah sudah digunakannya kartu RUIM yang mirip dengan kartu SIM pada layanan seluler, hal ini memungkinkan pelanggan FWA melakukan pergantian terminal / *handset* yang juga merupakan kegemaran masyarakat Indonesia pada umumnya. Kondisi yang ada ini membuat FWA menjadi pesaing langsung terhadap layanan seluler.

Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler merasa bahwa FWA merupakan pesaing terhadap layanan seluler, oleh karena itu penyelenggara seluler meminta Pemerintah untuk menurunkan BHP Frekuensi yang dikenakan terhadap penyelenggara seluler. Penyelenggara seluler yaitu Excelcomindo dan Telkomsel bahkan mengajukan izin penyelenggaraan FWA kepada Pemerintah untuk mengoptimalkan pendapatannya.

Menyadari ketidakadilan yang terjadi, Pemerintah akan melakukan penyesuaian BHP Frekuensi Penyelenggara FWA dan Penyelenggara seluler 2G dengan model BHP Frekuensi berbasis pita. Dengan dilakukan penyesuaian ini diharapkan akan menciptakan iklim persaingan yang lebih sehat menyongsong era konvergensi penyelenggaraan telekomunikasi atau Perizinan Menyatu / *Unified Licensing* yang cepat atau lambat akan diberlakukan di Indonesia.

1.2. PERMASALAHAN

Melihat kemungkinan naiknya BHP Frekuensi yang dibebankan kepada penyelenggara FWA, hal ini dapat memberikan dampak bisnis yang negatif

terhadap penyelenggara FWA dimana saat ini para penyelenggara FWA telah memberlakukan tarif pungut yang jauh dibawah tarif pungut yang diberlakukan oleh penyelenggara layanan seluler 2G. Tarif pungut murah inilah yang saat ini menjadi daya saing penyelenggara FWA. Kenaikan BHP Frekuensi bagi penyelenggara FWA akan meningkatkan biaya operasional dan akan mengurangi tingkat keuntungan. Pada tingkat tertentu akan menekan keuntungan penyelenggara FWA hingga dibawah batas wajar atau tidak ada keuntungan sama sekali, situasi ini akan memaksa penyelenggara FWA untuk menaikkan tarif pungut kepada pengguna. Kenaikan tarif pungut yang terlalu tinggi akan menurunkan daya saing layanan FWA yang pada gilirannya akan mengancam eksistensi penyelenggara FWA dan dapat merugikan masyarakat sebagai pengguna layanan.

1.3. TUJUAN

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Menganalisis dampak bisnis dari kenaikan BHP Frekuensi terhadap penyelenggaraan FWA dengan menghitung indikator kinerja bisnis yaitu *Net Income / Pendapatan Bersih*, *RoA*, *Margin Laba Operasi* dan *EBITDA Margin*.
2. Mengetahui sejauh mana kenaikan tarif layanan FWA yang mungkin terjadi dengan naiknya BHP Frekuensi dengan memperhatikan tarif pungut layanan FWA yang berlaku saat ini.

1.4. BATASAN PERMASALAHAN

Dengan maksud agar penelitian ini menjadi lebih terarah serta dukungan data yang tersedia, maka ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggara layanan FWA yang akan menjadi obyek penelitian adalah PT. Telkom dan PT. Bakrie Telecom.
2. Besarnya BHP Frekuensi FWA setelah dinaikkan adalah sama dengan BHP Frekuensi layanan Seluler.

Berisi proses perhitungan tarif pungut berbasis biaya menggunakan metode *Full Allocated Cost* dan Rasio Kinerja Bisnis Penyelenggaraan Jaringan Tetap Akses Nirkabel untuk Bakrie Telecom dan PT. Telkom.

BAB 5 ANALISIS DAMPAK BISNIS KENAIKAN BHP FREKUENSI PADA PENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP AKSES NIRKABEL

Berisi analisis kinerja bisnis penyelenggara FWA, perbandingan kinerja bisnisnya dengan penyelenggara telekomunikasi lain, industri di sektor lain dan beberapa operator di negara lain. Bab ini diakhiri dengan analisis kenaikan BHP Frekuensi pada penyelenggaraan jaringan tetap akses nirkabel dengan cara menaikkan beban biaya frekuensi dan menghitung perubahan nilai indikator kinerja bisnisnya kemudian dilakukan analisis.

BAB 6 KESIMPULAN

Bab ini berisikan kesimpulan dari kajian yang telah dilakukan dan manfaat kajian yang dilakukan.